



BADAN PENDAPATAN DAERAH
Kabupaten Jombang



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Inovatif

bangga
melayani
bangsa

Rencana Kerja 2026

**BADAN
PENDAPATAN
DAERAH**

Kabupaten Jombang

bapenda.jombangkab.go.id

[bapendajombang](#)

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141,
Kepanjen, Jombang

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Renja ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 ke dalam rencana tahunan. Renja Tahun 2026 memuat arah kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam aspek peningkatan pendapatan daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Renja dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan partisipatif, melalui proses identifikasi kebutuhan, evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan pemetaan isu strategis yang berkembang. Dokumen ini juga disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan kebijakan nasional maupun regional yang relevan, serta mempertimbangkan dinamika fiskal, tantangan pembangunan, dan peluang peningkatan potensi pendapatan daerah.

Sebagai pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan, Renja ini berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, serta pengukuran kinerja instansi pada tahun anggaran berjalan. Lebih dari itu, Renja juga menjadi instrumen akuntabilitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, yang menekankan pada keterukuran hasil, efektivitas pelaksanaan, serta akuntabilitas publik terhadap penggunaan anggaran.

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan, kolaborasi, dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, pejabat struktural, serta perangkat daerah terkait yang telah mendukung tersedianya data dan informasi yang diperlukan. Masukan dan sinergi yang terbangun dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam memastikan Renja ini responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adaptif terhadap dinamika kebijakan.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi landasan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil, serta mampu mendorong terwujudnya tata kelola pendapatan daerah yang

profesional, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Jombang yang lebih maju dan mandiri.

Jombang, 17 Juli 2025



**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang**

HARTONO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691002 198903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Rencana Kerja	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	13
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	35
3.3 Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	48
4.1 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan	48
BAB V PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, dan memperkuat kapasitas keuangan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang memiliki peran strategis sebagai pengelola utama pendapatan daerah. Peran ini mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Peningkatan kapasitas pendapatan daerah menjadi kunci dalam membiayai program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dilakukan sebagai bentuk penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Renstra tersebut telah menetapkan arah kebijakan, tujuan strategis, sasaran, serta indikator kinerja utama yang harus dicapai dalam kurun lima tahun, sehingga Renja menjadi instrumen operasional untuk memastikan langkah-langkah pencapaian target tahunan berjalan terarah dan terukur.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antarsektor.

Selain itu, Renja ini merupakan wujud penerapan perencanaan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), yang menekankan pentingnya keterukuran sasaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan akuntabilitas pelaksanaan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan pendapatan yang lebih efektif, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi daerah, baik dalam aspek regulasi, teknologi, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mampu merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pendapatan, memperluas basis pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan penerimaan daerah sebagai sumber

pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2026 akan menjadi bagian penting dari kontribusi Bapenda terhadap pencapaian target kinerja Renstra 2025–2029 dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 berlandaskan dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 6) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
- 17) Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
- 18) Peraturan Bupati Jombang Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
- 19) Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; dan
- 20) Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 000.7/783/415.01/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pendapatan Daerah guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;

- 2) Mempermudah pelaksanaan koordinasi serta pengendalian kegiatan yang mencakup monitoring, analisis, evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi terkait baik secara internal maupun secara eksternal;
- 3) Memberikan informasi kepada pejabat terkait tentang rencana kinerja tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya;
- 4) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam menentukan prioritas-prioritas program di bidang pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan bisa tercapai tepat waktu.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah yang lebih berkualitas;
- 2) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- 3) Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik;
- 4) Tersedianya informasi tentang Pendapatan daerah yang cepat dan akurat;
- 5) Tersedianya piranti pendukung Pendapatan daerah yang memadai.

1.4 Sistematika Rencana Kerja

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Rencana Kerja

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan kegiatan diperlukan guna memperbaiki hal-hal yang menyebabkan pencapaian target kinerja kurang optimal. Evaluasi juga berguna sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya jika dirasakan manfaatnya untuk kepentingan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah kabupaten Jombang. Sasaran yang tertuang dalam Renstra tersebut telah dilaksanakan melalui program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2026 dengan rincian 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan.

Adapun beberapa pencapaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun 2025 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya dokumen SAKIP OPD;
- 2) Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dan meningkatnya kualitas pelayanan;
- 3) Meningkatnya potensi PAD;
- 4) Meningkatnya keakuratan data objek pajak;
- 5) Terlaksananya penetapan serta penerbitan data.

Beberapa hal yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program kegiatan dapat tercapai sesuai target yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan yang didukung oleh sarana dan prasarana kerja;
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
- 3) Meningkatkan akurasi data pendapatan daerah;
- 4) Tertib administrasi pelaporan pendapatan daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah digambarkan dengan matriks sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tribulan II Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Nama Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9
5.02.04	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100,00%	8%	100,00%	108,64%	108,64%	100,00%	47,65%	47,65%
5.02.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Rp194.080.000. 000	2	Rp194.080.000. 000	Rp207.379.735. 020	106,85%	Rp287.372.602. 400	Rp173.226.471. 142	60,28%
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	694.000 OP	696.867 OP	694.000 OP	767.642 OP	110,61%	810.100 OP	789.584 OP	97,47%
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Rp194.080.000. 000	Rp185.969.721. 019	Rp194.080.000. 000	Rp207.379.735. 020	106,85%	Rp287.372.602. 400	Rp173.226.471. 142	60,28%
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Rp413.800.000. 000	n/a	Rp413.800.000. 000	Rp391.085.741. 764	94,51%	Rp393.262.558. 795	Rp151.092.767. 958	38,42%
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	n/a	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	2 dokumen	50,00%

Kode	Nama Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	50,00%
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	50,00%
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	692.000 dokumen	696.867 dokumen	692.000 dokumen	767.642 dokumen	110,93%	810 100 dokumen	789.584 dokumen	97,47%
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3.500 layanan	n/a	3.500 layanan	3.750 layanan	107,14%	4.000 layanan	3 289 layanan	82,23%
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	12 dokumen	6 dokumen	50,00%
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	12 dokumen	6 dokumen	50,00%
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	12 laporan	n/a	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	50,00%

Kode	Nama Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Prosentase Rata - rata capaian kinerja aparatur	90,00%	90,00%	90,00%	101,72%	113,02%	90,00%	101,45%	112,72%
5.02.01.2.01	Perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	58,33%	58,33%
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	3 dokumen	2 dokumen	66,67%
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	100,00%	9 laporan	5 laporan	55,56%
5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	45,27%	45,27%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/bulan	1.118 orang/tahun	70 orang/bulan	70 orang/bulan	100,00%	61 orang/bulan	61 orang/bulan	100,00%

Kode	Nama Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dok	100,00%	12 dokumen	6 dokumen	50,00%
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	n/a	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	0 laporan	#VALUE!
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	100,00%	n/a	100,00%	97,25%	97,25%	100,00%	0,00%	0,00%
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87 paket	n/a	87 paket	87 paket	100,00%	61 paket	0 paket	0,00%
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	n/a	5 orang	- orang	0%	3 orang	0 orang	0,00%
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 orang	n/a	90 orang	90 orang	100,00%	76 orang	0 orang	0,00%
5.02.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	61,9%	61,90%

Kode	Nama Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100,00%	19 paket	12 paket	63,16%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	7 paket	1 paket	1 paket	100,00%	61 paket	18 paket	29,51%
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00%	12 paket	6 paket	50,00%
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	8 paket	1 paket	1 paket	100,00%	12 paket	6 paket	50,00%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	3 paket	17 paket	17 paket	100,00%	11 paket	6 paket	54,55%
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100,00%	48 dokumen	24 dokumen	50,00%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	12 laporan	8 laporan	8 laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	50,00%
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%

Kode	Nama Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	50,00%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	50,00%
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,63%	40,63%
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	36 unit	32 unit	32 unit	100,00%	32 unit	16 unit	50,00%
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	0 unit	0,00%
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 unit	20 unit	21 unit	21 unit	100,00%	16 unit	10 unit	62,50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan. Tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, dapat dilaksanakan melalui beberapa aspek sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;
- 2) Keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang difokuskan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 3) Keselarasan antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah yang difokuskan pada masalah Pendapatan yaitu melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Penetapan dan penerbitan data potensi, serta pengendalian dan pelaporan penerimaan PAD secara tertib melalui pelayanan dasar dan pelayanan penunjang sesuai RPJMD;
- 4) Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan yang difokuskan pada Peraturan Bupati terkait Pendapatan Daerah yang perlu ditindaklanjuti;
- 5) Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD;
- 6) Pengelolaan Potensi Daerah yang difokuskan pada Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD, dan Peningkatan PAD dari tahun sebelumnya;
- 7) Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat yang difokuskan pada bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsifitas terhadap partisipasi masyarakat melalui survey kepuasan pelanggan.

Beberapa aspek tersebut diatas dirinci dalam matriks Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD sampai dengan Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.2 (T.C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2023 s.d 30 Juni 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025 (s/d triwulan II)		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	163.627.000.000,00	185.969.721.019,00	113,65%	194.080.000.000,00	207.379.735.020,00	106,85%	287.372.602.400,00	173.226.471.142,00	60,28%
2	Hasil Retribusi Daerah	19.862.764.623,00	24.642.310.018,00	124,06%	17.732.270.723,00	21.042.867.495,96	118,67%	417.192.831.521,00	187.503.007.712,00	44,94%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.308.019.425,00	5.778.730.454,51	79,07%	7.384.450.497,00	7.283.403.750,66	98,63%	8.273.752.694,00	1.465.839.504,29	17,72%
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	361.840.818.680,00	411.768.856.235,85	113,80%	365.778.434.092,00	399.808.214.791,98	109,30%	9.917.908.149,00	20.748.064.706,65	209,20%
		552.638.602.728,00	628.159.617.727,36	113,67%	584.975.155.312,00	635.514.221.058,60	108,64%	722.757.094.764,00	382.943.383.064,94	52,98%

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, terdapat beberapa isu penting yang perlu adanya penyelesaian dan pembentukan langkah dan arah kebijakan dalam mengatasinya.

Berdasarkan hasil analisis pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah:

- 1) Keakuratan Data base Pajak dan Retribusi Daerah ;
- 2) Tersebarnya Lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten yang sulit diidentifikasi;
- 3) Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutangnya;
- 4) Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
- 5) Kurang optimalnya kualitas pelayanan Pajak Daerah.

Dengan demikian kesimpulan dari Isu strategis di atas adalah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa hal yang diperlukan dalam mengatasi isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya sistem pendataan yang semakin akurat, jelas dan mudah dipahami berlandaskan pada aturan pengelolaan pendapatan yang berlaku;
- 2) Terciptanya pengelolaan pendapatan daerah yang semakin terdesentralisasi pada satuan kerja yang terkecil/desa serta berbasis pada capaian kinerja;
- 3) Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM yang memadai dan mempunyai kapasitas sesuai dengan harapan;
- 4) Terciptanya kebijakan-kebijakan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 5) Terlaksananya pendataan pajak daerah oleh pihak ketiga yang berkompeten;
- 6) Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap wajib pajak dan retribusi;
- 7) Terciptanya *reward* dan *punishment* yang jelas terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan terkait APBD; dan
- 8) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai hasil dari proses perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dokumen ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan RKPD bertujuan untuk merencanakan kegiatan pembangunan daerah secara lebih tertib, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Agar perencanaan ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak, seperti masyarakat umum, instansi pemerintah pusat dan daerah, DPRD, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya keterlibatan semua pihak, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

RKPD juga berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja. Salah satunya adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Program dan kegiatan Bapenda yang dirancang dalam Rencana Kerja Tahun 2026 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2026.

Program-program tersebut disusun untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah, memperbaiki layanan pajak dan retribusi, serta memperkuat kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang agar lebih profesional dan efisien. Dengan adanya perencanaan ini, diharapkan kinerja Bapenda semakin baik dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

Adapun program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Rencana Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
	Nama program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator/Keluaran	Target	Lokasi	Usulan Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026	Nama program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator/Keluaran	Target	Lokasi	Usulan Anggaran (Rp.)	Prakiraan Maju Tahun 2026
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			BAPENDA	6.905.340.829	6.905.340.829	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			BAPENDA	6.905.340.829	6.905.340.829
	Terlaksananya Peningkatan Capaian PAD Terhadap Target	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target	100% %	BAPENDA	4.358.485.321	4.358.485.321	Terlaksananya Peningkatan Capaian PAD Terhadap Target	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target	100% %	BAPENDA	4.358.485.321	4.358.485.321
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			BAPENDA	4.358.485.321	4.358.485.321	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			BAPENDA	4.358.485.321	4.358.485.321
	Terlaksananya Capaian Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4.000 layanan	BAPENDA			Terlaksananya Capaian Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4.000 layanan	BAPENDA		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	BAPENDA				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	BAPENDA		
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4.000 layanan	BAPENDA	355.084.570	355.084.570	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4.000 layanan	BAPENDA	355.084.570	355.084.570
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	BAPENDA	3.854.671.500	3.854.671.500	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	BAPENDA	3.854.671.500	3.854.671.500
	Terlaksananya Capaian Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	BAPENDA			Terlaksananya Capaian Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	BAPENDA		
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	BAPENDA	148.729.251	148.729.251	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	BAPENDA	148.729.251	148.729.251

	Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah	Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa	90.815.600 Rp	BAPENDA	955.471.222	955.471.222	Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah	Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa	90.815.600 Rp	BAPENDA	955.471.222	955.471.222
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			BAPENDA	955.471.222	955.471.222	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			BAPENDA	955.471.222	955.471.222
	Tercapainya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	BAPENDA			Tercapainya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	BAPENDA		
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		12 laporan	BAPENDA			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		12 laporan	BAPENDA			
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		12 dokumen	BAPENDA			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		12 dokumen	BAPENDA			
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	BAPENDA	447.699.472	447.699.472	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	BAPENDA	447.699.472	447.699.472
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan	BAPENDA	382.507.000	382.507.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan	BAPENDA	382.507.000	382.507.000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	BAPENDA	125.264.750	125.264.750	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	BAPENDA	125.264.750	125.264.750

	Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	294.446.000.000 Rp	BAPENDA	1.591.384.286	1.591.384.286	Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	294.446.000.000 Rp	BAPENDA	1.591.384.286	1.591.384.286
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			BAPENDA	1.591.384.286	1.591.384.286	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			BAPENDA	1.591.384.286	1.591.384.286
	Terlaksananya Penetapan atas Objek Pajak Hasil Pendataan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	BAPENDA			Terlaksananya Penetapan atas Objek Pajak Hasil Pendataan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	BAPENDA		
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	810.000 dokumen	BAPENDA				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	810.000 dokumen	BAPENDA		
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	BAPENDA	1.051.333.236	1.051.333.236	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	BAPENDA	1.051.333.236	1.051.333.236
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	810.100 dokumen	BAPENDA	540.051.050	540.051.050	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	810.100 dokumen	BAPENDA	540.051.050	540.051.050
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			BAPENDA	18.747.756.429	18.747.756.429	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			BAPENDA	18.747.756.429	18.747.756.429
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	79 Nilai	BAPENDA	18.747.756.429	18.747.756.429	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	79 Nilai	BAPENDA	18.747.756.429	18.747.756.429
5.02.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			BAPENDA	18.976.000	18.976.000	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			BAPENDA	18.976.000	18.976.000
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	BAPENDA			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	BAPENDA		

	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	BAPENDA			dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	BAPENDA		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	BAPENDA	9.595.000	9.595.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	BAPENDA	9.595.000	9.595.000
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	BAPENDA	9.381.000	9.381.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	BAPENDA	9.381.000	9.381.000
5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			BAPENDA	15.400.266.697	15.400.266.697	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			BAPENDA	15.400.266.697	15.400.266.697
	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang/bulan	BAPENDA			Terlaksananya Administrasi Keuangan PD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang/bulan	BAPENDA		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	BAPENDA				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	BAPENDA		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 laporan	BAPENDA				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 laporan	BAPENDA		

		Tahun SKPD Perangkat Daerah						Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah				
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang/bulan	BAPENDA	14.960.719.697	14.960.719.697	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang/bulan	BAPENDA	14.960.719.697	14.960.719.697
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	BAPENDA	437.970.000	437.970.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	BAPENDA	437.970.000	437.970.000
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah	1 laporan	BAPENDA	1.577.000	1.577.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah	1 laporan	BAPENDA	1.577.000	1.577.000
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			BAPENDA	164.280.250	164.280.250	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			BAPENDA	164.280.250	164.280.250
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	82 paket	BAPENDA			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	82 paket	BAPENDA		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	BAPENDA				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	BAPENDA		
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	82 paket	BAPENDA	26.640.250	26.640.250	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	82 paket	BAPENDA	26.640.250	26.640.250
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	BAPENDA	137.640.000	137.640.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	BAPENDA	137.640.000	137.640.000

5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			BAPENDA	732.999.000	732.999.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				732.999.000	732.999.000
	Terlaksananya Administrasi Umum PD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	BAPENDA			Terlaksananya Administrasi Umum PD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	BAPENDA		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	BAPENDA				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	BAPENDA		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	BAPENDA				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	BAPENDA		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	BAPENDA				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	BAPENDA		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	BAPENDA				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	BAPENDA		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	BAPENDA				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	BAPENDA		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	BAPENDA				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	BAPENDA		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	BAPENDA	18.883.350	18.883.350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	BAPENDA	18.883.350	18.883.350
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	5 paket	BAPENDA	96.756.150	96.756.150	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	5 paket	BAPENDA	96.756.150	96.756.150

		Kantor yang Disediakan						Kantor yang Disediakan				
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	BAPENDA	10.404.250	10.404.250	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	BAPENDA	10.404.250	10.404.250
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	BAPENDA	439.448.400	439.448.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	BAPENDA	439.448.400	439.448.400
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	BAPENDA	29.912.850	29.912.850	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	BAPENDA	29.912.850	29.912.850
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 dokumen	BAPENDA	11.760.000	11.760.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 dokumen	BAPENDA	11.760.000	11.760.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	BAPENDA	125.834.000	125.834.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	BAPENDA	125.834.000	125.834.000
5.02.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			BAPENDA	1.417.674.300	1.417.674.300	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			BAPENDA	1.417.674.300	1.417.674.300
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	BAPENDA			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	BAPENDA		
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	BAPENDA	1.417.674.300	1.417.674.300	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	BAPENDA	1.417.674.300	1.417.674.300
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			BAPENDA	486.248.682	486.248.682	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			BAPENDA	486.248.682	486.248.682

	Pemerintahan Daerah						Pemerintahan Daerah					
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	BAPENDA			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	BAPENDA		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	BAPENDA				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	BAPENDA		
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	BAPENDA	250.320.00	250.320.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	BAPENDA	250.320.00	250.320.00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	BAPENDA	235.928.682	235.928.682	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	BAPENDA	235.928.682	235.928.682
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			BAPENDA	527.311.500	527.311.500	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			BAPENDA	527.311.500	527.311.500
	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	BAPENDA			Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	BAPENDA		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	BAPENDA				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	BAPENDA		

		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	BAPENDA				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	BAPENDA		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	BAPENDA	324.240.000	324.240.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	BAPENDA	324.240.000	324.240.000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	BAPENDA	14.201.500	14.201.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	BAPENDA	14.201.500	14.201.500
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	BAPENDA	188.870.000	188.870.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	BAPENDA	188.870.000	188.870.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berpedoman pada RKPD dan berdasarkan hasil pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten, telah ditetapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2026. Dalam rencana tersebut, terdapat 2 (dua) program utama, yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan serta 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan.

Seluruh program dan kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian target pendapatan daerah serta peningkatan layanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan seluruh rencana kerja tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp25.653.097.258,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

Anggaran ini akan digunakan untuk mendanai seluruh aktivitas operasional dan strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, sehingga diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang pengelolaan pendapatan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA		6.905.340.829	APBD 2026
	Terlaksananya Peningkatan Capaian PAD Terhadap Target	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target	BAPENDA	100% %	4.358.485.321	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA		4.358.485.321	
	Terlaksananya Capaian Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	4.000 layanan		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	12 dokumen		
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	4.000 layanan	355.084.570	APBD 2026
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	12 dokumen	3.854.671.500	APBD 2026
	Terlaksananya Capaian Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	12 laporan		
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	12 laporan	148.729.251	APBD 2026
	Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah	Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa	BAPENDA	90.815.600 Rp	955.471.222	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA		955.471.222	
	Tercapainya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	4 dokumen		
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	12 laporan		
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	12 dokumen		

5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	4 dokumen	447.699.472	APBD 2026
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	12 laporan	382.507.000	APBD 2026
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	12 dokumen	125.264.750	APBD 2026
	Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	294.446.000.000 Rp	1.591.384.286	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA		1.591.384.286	
	Terlaksananya Penetapan atas Objek Pajak Hasil Pendataan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	12 laporan		
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	810.000 dokumen		
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	12 laporan	1.051.333.236	APBD 2026
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		810.100 dokumen	540.051.050	APBD 2026
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		BAPENDA		18.747.756.429	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		79 Nilai	18.747.756.429	APBD 2026
5.02.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		BAPENDA		18.976.000	APBD 2026
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	3 dokumen		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA	9 laporan		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	3 dokumen	9.595.000	APBD 2026
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		9 laporan	9.381.000	APBD 2026

5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		BAPENDA		15.400.266.697	APBD 2026
	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	59 orang/ bulan		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BAPENDA	12 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah	BAPENDA	1 laporan		
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	59 orang/ bulan	14.960.719.697	APBD 2026
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BAPENDA	12 dokumen	437.970.000	APBD 2026
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah		1 laporan	1.577.000	APBD 2026
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		BAPENDA		164.280.250	APBD 2026
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	BAPENDA	82 paket		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPENDA	10 orang		
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	BAPENDA	82 paket	26.640.250	APBD 2026
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 orang	137.640.000	APBD 2026
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		BAPENDA		732.999.000	APBD 2026
	Terlaksananya Administrasi Umum PD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	1 paket		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	5 paket		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BAPENDA	1 paket		

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPENDA	4 paket		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BAPENDA	4 paket		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPENDA	48 dokumen		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	12 laporan		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	1 paket	18.883.350	APBD 2026
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	5 paket	96.756.150	APBD 2026
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BAPENDA	1 paket	10.404.250	APBD 2026
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPENDA	4 paket	439.448.400	APBD 2026
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BAPENDA	4 paket	29.912.850	APBD 2026
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPENDA	48 dokumen	11.760.000	APBD 2026
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	125.834.000	APBD 2026
5.02.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		BAPENDA		1.417.674.300	APBD 2026
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPENDA	10 unit		
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 unit	1.417.674.300	APBD 2026
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BAPENDA		486.248.682	APBD 2026
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPENDA	12 laporan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPENDA	12 laporan		
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPENDA	12 laporan	250.320.000	APBD 2026

5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	235.928.682	APBD 2026
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BAPENDA		527.311.500	APBD 2026
	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPENDA	33 unit		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BAPENDA	1 unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BAPENDA	1 unit		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPENDA	33 unit	324.240.000	APBD 2026
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BAPENDA	1 unit	14.201.500	APBD 2026
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BAPENDA	1 unit	188.870.000	APBD 2026

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional merupakan langkah awal dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Telaah ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional dituangkan dalam RKP Tahun 2026 diusung dengan tema "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema ini menjadi pijakan strategis dalam menghadapi tantangan global dan memastikan pembangunan yang berdampak merata dengan kluster prioritas:

1) **Kedaulatan Pangan dan Energi**

Fokus mencakup optimalisasi Bulog, pembangunan lumbung pangan (food estate), pengembangan energi terbarukan serta peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, pengelolaan air melalui sistem SPAM terintegrasi, dan tata kelola sampah.

2) **Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**

Meliputi program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggul, pemeriksaan kesehatan gratis, digitalisasi pendidikan, percepatan hilirisasi industri sumber daya alam, transformasi digital, percepatan pengentasan kemiskinan melalui program 3 juta rumah, hingga penguatan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, dan stabilitas fiskal.

Sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan tahunan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 memuat sasaran strategis yang diterjemahkan ke dalam berbagai indikator makro. Indikator-indikator ini menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pembangunan nasional secara menyeluruh, yang mencerminkan arah kebijakan serta prioritas pembangunan pemerintah. Sebagai bagian dari strategi sinergi, RKP 2026 juga mengacu pada 8 Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN, antara lain:

1) **Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM**

- 2) Kemandirian nasional melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi digital, hijau, dan syariah
- 3) Pengembangan infrastruktur, kewirausahaan, industri kreatif, agro-maritim
- 4) Penguatan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan inklusi
- 5) Hilirisasi industri berbasis SDA
- 6) Pembangunan dari desa dan pendekatan bottom-up
- 7) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
- 8) Hidup harmonis dengan lingkungan serta toleransi sosial

Dengan mengacu pada kebijakan nasional tersebut, perencanaan pembangunan di daerah diharapkan dapat terintegrasi dengan agenda nasional, mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat daya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Timur

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 dirancang dengan tema "Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang menekankan tiga pilar utama: peningkatan produktivitas ekonomi, pemerataan infrastruktur, serta penguatan kesejahteraan masyarakat. Visi yang diusung adalah "Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045." RPJMD ini mengidentifikasi 9 misi pembangunan (Nawa Bhakti Satya) sebagai kompas strategi lima tahun, yaitu:

- 1) Jatim Sejahtera – percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi
- 2) Jatim Kerja – penyediaan lapangan kerja berkualitas
- 3) Jatim Akses – penguatan konektivitas dan infrastruktur antardaerah
- 4) Jatim Agro – peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan
- 5) Jatim Cerdas – pemerataan akses dan mutu Pendidikan
- 6) Jatim Sehat – layanan kesehatan berkualitas dan mudah dijangkau
- 7) Jatim Berkah Amanah – pemerintahan yang bersih, efektif, dan partisipatif
- 8) Jatim Harmoni – pembangunan masyarakat inklusif dan toleran
- 9) Jatim Lestari – pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan

RKPD 2026 dirancang sebagai realisasi awal RPJMD, dan mengusung tema utama berikut: "Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Tema ini dirinci menjadi tiga fokus strategis:

- 1) Peningkatan produktivitas ekonomi: mendorong pertumbuhan inklusif yang menyentuh berbagai sektor dan lapisan masyarakat

- 2) Pemerataan infrastruktur: memperkuat konektivitas dan akses layanan dasar di seluruh wilayah
- 3) Kesejahteraan masyarakat: meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi

Sinergi strategis antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 menjadi landasan penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah yang berkesinambungan, terukur, dan berorientasi pada hasil. RPJMD menetapkan visi, misi, serta tujuan pembangunan jangka menengah yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan wilayah, penguatan ketahanan sosial-budaya, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Sementara itu, RKPD 2026 berperan sebagai penjabaran tahunan RPJMD, memfokuskan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai kebutuhan aktual daerah, dinamika global, dan target indikator makro nasional. Melalui keterpaduan keduanya, diharapkan arah kebijakan pembangunan Jawa Timur pada 2026 dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jombang

Tema pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2026 adalah “Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Strategis”, yang menjadi landasan pergerakan awal menuju visi “Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua” sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2025–2030. Fokus Arah Kebijakan Tahun 2026:

- 1) Pengentasan Pengangguran & Pengurangan Kemiskinan
- 2) Prioritas diarahkan pada peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal
- 3) Peningkatan Status Gizi dan Sanitasi Layak
- 4) Upaya konkret menyentuh aspek kualitas hidup dengan memperbaiki layanan gizi dan akses sanitasi di masyarakat
- 5) Peningkatan Kualitas Layanan & Infrastruktur Dasar
- 6) Berbagai inisiatif layanan pendidikan dan kesehatan ditopang oleh peningkatan sarana prasarana secara berkelanjutan
- 7) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Layanan Publik
- 8) Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi prioritas
- 9) Penguatan Ekonomi Daerah & Ketahanan Pangan

10) Arah kebijakan membentuk fondasi ekonomi inklusif, mandiri, dan stabil dengan memperkuat ketahanan pangan serta memerangi inflasi

Berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang, ditetapkan lima misi strategis yang menjadi landasan utama arah pembangunan jangka menengah daerah yaitu:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global;
- 2) Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan;
- 3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, pengembangan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- 4) Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal;
- 5) Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif, melayani, akuntabel, bersih dan bebas korupsi

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jombang 2026 menitikberatkan pada memperkuat fondasi transformasi strategis melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, pembenahan tata kelola, penguatan ekonomi dan ketahanan pangan. Pendekatan ini menjadi fase awal penerjemahan visi jangka menengah ke dalam program nyata yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang disusun sebagai pedoman yang mengarahkan seluruh program dan kegiatan agar selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah yang didasarkan dari rumusan berbagai isu penting pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Tahun 2026

Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22,70	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8,94
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	77,5

Sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menekankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis digital, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang menetapkan tujuan yaitu, Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Transparan melalui Kemandirian Keuangan Daerah. Tujuan ini mencerminkan peran Bapenda dalam mendukung kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola secara profesional dan berbasis teknologi informasi. Ketangguhan keuangan daerah menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya pemerintahan yang efisien dan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, integritas birokrasi, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta pemanfaatan sistem digital dalam proses administrasi perpajakan dan retribusi daerah menjadi fokus utama dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan tata kelola pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tersebut, dapat dirumuskan sasaran yaitu, Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif. Perumusan Renstra tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi, isu-isu strategis yang dihadapi, serta hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya. Sasaran ini menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan indikator kinerja utama yang akan dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan selama periode perencanaan.

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintahan daerah program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Terlaksananya Peningkatan Capaian PAD Terhadap Target	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Terlaksananya Capaian Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
	Terlaksananya Capaian Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
	Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah	Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Tercapainya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
	Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Terlaksananya Penetapan atas Objek Pajak Hasil Pendataan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
5.02.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah

5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Terlaksananya Administrasi Umum PD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Dari uraian tersebut diatas dapat di lihat pada rincian tabel matriks Rencana kerja (Renja) tahun 2026, berikut ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintahan daerah program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				6.905.340.829	APBD 2026			7.250.607.870
	Terlaksananya Peningkatan Capaian PAD Terhadap Target	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target	BAPENDA	100% %	4.358.485.321			100% %	4.576.409.587
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA		4.358.485.321				4.576.409.587
	Terlaksananya Capaian Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	4.000 layanan				4.000 layanan	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	12 dokumen				12 dokumen	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	4.000 layanan	355.084.570	APBD 2026		4.000 layanan	372.838.799
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	12 dokumen	3.854.671.500	APBD 2026		12 dokumen	4.047.405.075
	Terlaksananya Capaian Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	12 laporan				12 laporan	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	12 laporan	148.729.251	APBD 2026		12 laporan	156.165.714
	Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah	Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa	BAPENDA	90.815.600 Rp	955.471.222			90.815.600 Rp	1.003.244.783

	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA		955.471.222				1.003.244.783
	Tercapainya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	4 dokumen				4 dokumen	
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	12 laporan				12 laporan	
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	12 dokumen				12 dokumen	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	4 dokumen	447.699.472	APBD 2026		4 dokumen	470.084.446
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	12 laporan	382.507.000	APBD 2026		12 laporan	401.632.350
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	12 dokumen	125.264.750	APBD 2026		12 dokumen	131.527.988
	Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	294.446.000.000 Rp	1.591.384.286			294.446.000.000 Rp	1.670.953.500
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA		1.591.384.286				1.670.953.500
	Terlaksananya Penetapan atas Objek Pajak Hasil Pendataan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	12 laporan				12 laporan	

		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	810.000 dokumen				810.000 dokumen	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	12 laporan	1.051.333.236	APBD 2026		12 laporan	1.103.899.898
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	810.100 dokumen	540.051.050	APBD 2026		810.100 dokumen	567.053.603
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				18.747.756.429				19.685.144.250
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BAPENDA	79 Nilai	18.747.756.429	APBD 2026		79 Nilai	19.685.144.250
5.02.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.976.000	APBD 2026			19.924.800
	Terlaksananya Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	3 dokumen				3 dokumen	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA	9 laporan				9 laporan	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	3 dokumen	9.595.000	APBD 2026		3 dokumen	10.074.750
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	BAPENDA	9 laporan	9.381.000	APBD 2026		9 laporan	9.850.050

		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.400.266.697	APBD 2026			16.170.280.032
	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	59 orang/bulan				59 orang/bulan	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BAPENDA	12 dokumen				12 dokumen	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah	BAPENDA	1 laporan				1 laporan	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	59 orang/bulan	14.960.719.697	APBD 2026		59 orang/bulan	15.708.755.682
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BAPENDA	12 dokumen	437.970.000	APBD 2026		12 dokumen	459.868.500
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah	BAPENDA	1 laporan	1.577.000	APBD 2026		1 laporan	1.655.850
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				164.280.250	APBD 2026			172.494.263
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	BAPENDA	82 paket				82 paket	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	BAPENDA	10 orang				10 orang	

		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BAPENDA	82 paket	26.640.250	APBD 2026		82 paket	27.972.263
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPENDA	10 orang	137.640.000	APBD 2026		10 orang	144.522.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				732.999.000	APBD 2026			769.648.950
	Terlaksananya Administrasi Umum PD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	1 paket				1 paket	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	5 paket				5 paket	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BAPENDA	1 paket				1 paket	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPENDA	4 paket				4 paket	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BAPENDA	4 paket				4 paket	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPENDA	48 dokumen				48 dokumen	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	12 laporan				12 laporan	
5.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	BAPENDA	1 paket	18.883.350	APBD 2026		1 paket

		Bangunan Kantor yang Disediakan							
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	5 paket	96.756.150	APBD 2026		5 paket	101.593.958
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BAPENDA	1 paket	10.404.250	APBD 2026		1 paket	10.924.463
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPENDA	4 paket	439.448.400	APBD 2026		4 paket	461.420.820
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BAPENDA	4 paket	29.912.850	APBD 2026		4 paket	31.408.493
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPENDA	48 dokumen	11.760.000	APBD 2026		48 dokumen	12.348.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	12 laporan	125.834.000	APBD 2026		12 laporan	132.125.700
5.02.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.417.674.300	APBD 2026			1.488.558.015
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPENDA	10 unit				10 unit	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPENDA	10 unit	1.417.674.300	APBD 2026		10 unit	1.488.558.015
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				486.248.682	APBD 2026			510.561.116
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	BAPENDA	12 laporan				12 laporan	

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPENDA	12 laporan				12 laporan	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPENDA	12 laporan	250.320.000	APBD 2026		12 laporan	262.836.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPENDA	12 laporan	235.928.682	APBD 2026		12 laporan	247.725.116
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				527.311.500	APBD 2026			553.677.075
	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPENDA	33 unit				33 unit	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BAPENDA	1 unit				1 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BAPENDA	1 unit				1 unit	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPENDA	33 unit	324.240.000	APBD 2026		33 unit	340.452.000

5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BAPENDA	1 unit	14.201.500	APBD 2026		1 unit	14.911.575
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BAPENDA	1 unit	188.870.000	APBD 2026		1 unit	198.313.500

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini kemudian dijabarkan secara tahunan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2026 sendiri telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023.

Dalam dokumen tersebut, Bapenda Kabupaten Jombang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-5, yaitu Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif (*open & collaborative governance*), melayani, akuntabel, bersih dan bebas korupsi. Komitmen tersebut tidak hanya tercermin dalam aspek pelayanan dan tata kelola internal, tetapi juga dalam peran aktif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam memperkuat fondasi keuangan daerah yang berkelanjutan. Melalui kebijakan yang berorientasi pada integritas dan efisiensi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berupaya menciptakan sistem pengelolaan pendapatan yang lebih transparan dan partisipatif. Hal ini menjadi landasan penting dalam mendorong tercapainya birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta tuntutan reformasi birokrasi yang semakin kompleks.

Dapat dilihat pada matriks Renstra tahun 2025-2029, tujuan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Transparan melalui Kemandirian Keuangan Daerah. Tujuan ini mencerminkan peran Bapenda dalam mendukung kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola secara profesional dan berbasis teknologi informasi. Ketangguhan keuangan daerah menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya pemerintahan yang efisien dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai. Sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif.

Anggaran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam Renja Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 25.653.097.258 dengan rincian Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Masukan : Jumlah Anggaran Rp 6.905.340.829
Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa Rp 90.815.600
Jumlah Ketetapan Pajak Daerah Rp 1.591.384.286
Persentase Realisasi PAD Terhadap Target 100%

Kegiatan pada program ini antara lain :

a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp 955.471.222
Sumber Dana: APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa Rp 90.815.600

Masukan : Jumlah Anggaran Rp 1.591.384.286
Sumber Dana: APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Ketetapan Pajak Daerah Rp 1.591.384.286

Masukan : Jumlah Anggaran Rp 4.358.485.321
Sumber Dana: APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
Hasil : Persentase Realisasi PAD Terhadap Target 100%

Sub. Kegiatan pada Kegiatan ini antara lain :

a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp 447.699.472
Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 4 dokumen

b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp 1.051.333.236
Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Daerah 12 laporan

- c. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp 382.507.000
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 laporan
 - d. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp 540.051.050
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 810.100 dokumen
 - e. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp 355.084.570
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 4.000 layanan
 - f. Penagihan Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp 3.854.671.500
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 dokumen
 - g. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp 125.264.750
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 dokumen
 - h. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp 148.729.251
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 laporan
- 2) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp 18.747.756.429
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang

Hasil : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah 79

Kegiatan pada program ini antara lain :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan pada Kegiatan ini antara lain :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp 9.595.000

Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dokumen

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Masukan : Jumlah Anggaran Rp 9.381.000

Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 laporan

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan pada Kegiatan ini antara lain :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Masukan : Jumlah Anggaran Rp 14.960.719.697

Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 59 orang/bulan

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Masukan : Jumlah Anggaran Rp 437.970.000

Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 dokumen

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Masukan : Jumlah Anggaran Rp 1.577.000

Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah 1 Laporan

- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan pada Kegiatan ini antara lain :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp 26.640.250
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 82 paket
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp 137.640.000
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 orang
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan pada Kegiatan ini antara lain :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp 18.883.350
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp 96.756.150
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 paket
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp 10.404.250
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp 439.448.400
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 paket
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Masukan : Jumlah Anggaran Rp 29.912.850
- Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 4 paket
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp 11.760.000
- Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 48 dokumen
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp 125.834.000
- Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9 laporan
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub. Kegiatan pada Kegiatan ini antara lain :
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp 1.417.674.300
- Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 unit
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub. Kegiatan pada Kegiatan ini antara lain :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp 250.320.000
- Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp 235.928.682
- Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub. Kegiatan pada Kegiatan ini antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Masukan : Jumlah Anggaran Rp 324.240.000
Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 unit
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Masukan : Jumlah Anggaran Rp 14.201.500
Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Masukan : Jumlah Anggaran Rp 188.870.000
Sumber Dana : APBD Tahun 2026 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintahan daerah program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.905.340.829	APBD 2026
	Terlaksananya Peningkatan Capaian PAD Terhadap Target	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target	BAPENDA	100%	%	4.358.485.321	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA			4.358.485.321	
	Terlaksananya Capaian Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	4.000	layanan		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	12	dokumen		
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	4.000	layanan	355.084.570	APBD 2026
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	12	dokumen	3.854.671.500	APBD 2026
	Terlaksananya Capaian Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	12	laporan		
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	12	laporan	148.729.251	APBD 2026
	Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah	Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa	BAPENDA	90.815.600	Rp	955.471.222	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA			955.471.222	
	Tercapainya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	4	dokumen		
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	12	laporan		
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	12	dokumen		

5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	4	dokumen	447.699.472	APBD 2026
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	12	laporan	382.507.000	APBD 2026
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	12	dokumen	125.264.750	APBD 2026
	Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	294.446.000.000	Rp	1.591.384.286	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA			1.591.384.286	
	Terlaksananya Penetapan atas Objek Pajak Hasil Pendataan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	12	laporan		
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	810.000	dokumen		
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	12	laporan	1.051.333.236	APBD 2026
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	810.100	dokumen	540.051.050	APBD 2026
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					18.747.756.429	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BAPENDA	79	Nilai	18.747.756.429	APBD 2026
5.02.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					18.976.000	APBD 2026
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	3	dokumen		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA	9	laporan		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	3	dokumen	9.595.000	APBD 2026
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA	9	laporan	9.381.000	APBD 2026

5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.400.266.697	APBD 2026
	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	59	orang/ bulan		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BAPENDA	12	dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah	BAPENDA	1	laporan		
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	59	orang/ bulan	14.960.719.697	APBD 2026
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BAPENDA	12	dokumen	437.970.000	APBD 2026
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah	BAPENDA	1	laporan	1.577.000	APBD 2026
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					164.280.250	APBD 2026
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	BAPENDA	82	paket		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPENDA	10	orang		
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	BAPENDA	82	paket	26.640.250	APBD 2026
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPENDA	10	orang	137.640.000	APBD 2026
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					732.999.000	APBD 2026
	Terlaksananya Administrasi Umum PD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	1	paket		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	5	paket		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BAPENDA	1	paket		

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPENDA	4	paket		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BAPENDA	4	paket		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPENDA	48	dokumen		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	12	laporan		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	1	paket	18.883.350	APBD 2026
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	5	paket	96.756.150	APBD 2026
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BAPENDA	1	paket	10.404.250	APBD 2026
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPENDA	4	paket	439.448.400	APBD 2026
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BAPENDA	4	paket	29.912.850	APBD 2026
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPENDA	48	dokumen	11.760.000	APBD 2026
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	12	laporan	125.834.000	APBD 2026
5.02.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.417.674.300	APBD 2026
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPENDA	10	unit		
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPENDA	10	unit	1.417.674.300	APBD 2026
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					486.248.682	APBD 2026
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPENDA	12	laporan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPENDA	12	laporan		
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPENDA	12	laporan	250.320.000	APBD 2026

5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPENDA	12	laporan	235.928.682	APBD 2026
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					527.311.500	APBD 2026
	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPENDA	33	unit		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BAPENDA	1	unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BAPENDA	1	unit		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPENDA	33	unit	324.240.000	APBD 2026
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BAPENDA	1	unit	14.201.500	APBD 2026
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BAPENDA	1	unit	188.870.000	APBD 2026

BAB V PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang Pendapatan daerah. Guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2026, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam rangka peningkatan dan pengelolaan Pendapatan Daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu tahun 2026, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen Badan Pendapatan Daerah untuk menjalankan program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi panduan operasional agar pelaksanaan tugas berjalan lebih fokus, terukur, dan mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Jombang.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini sangat bergantung pada peran aktif dan kerja sama seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah. Diperlukan komitmen, integritas, dan kedisiplinan dalam menjalankan setiap tahapan kegiatan agar hasilnya dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Kami berharap dokumen ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan menjadi acuan dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik. Dengan kerja keras dan semangat bersama, semoga Rencana Kerja Tahun 2026 ini mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan "Jombang Sejahtera untuk Semua".